



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MISTAM
2. Jabatan : DIREKTUR PROGRAM DAN PRODUKSI
3. NHK : 442943

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.656.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 89 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 97 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 630.000.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 266.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. 417.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SPLASH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
3. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
4. MOTOR, HONDA PHANTOM Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000
5. MOBIL, SUZUKI KATANA KATANA /JEEP Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
6. MOBIL, TOYOTA SUV/FORTUNER Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 12.300.000

**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 20.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	32.000.000
Sub Total	Rp.	2.137.300.000
III. HUTANG	Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.137.300.000

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.